

TESIS

**KEBIJAKAN PIDANA DALAM PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA**



Oleh

**TIA PAWANDA
NIM. 2320215320108**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2025**

TESIS

**KEBIJAKAN PIDANA DALAM PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA**



Oleh

**TIA PAWANDA
NIM. 2320215320108**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2025**

KEBIJAKAN PIDANA DALAM PENYELESAIAN

PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA

TESIS

**Untuk memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh

**TIA PAWANDA
NIM. 2320215320108**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2025**

**Judu Tesis : KEBIJAKAN PIDANA DALAM PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI
INDONESIA**

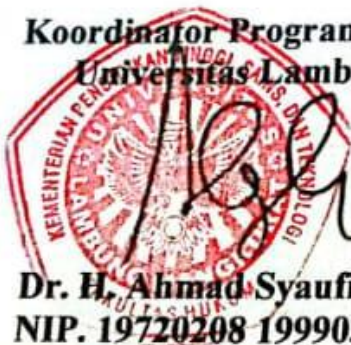
**Nama : Tia Pawanda
NIM : 2320215320108**

**Disetujui,
Pembimbing**

**Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 200501 1 002**

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001**

Tesis ini
Telah diperiksa dan disetujui
pada tanggal...

Pembimbing



Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 200501 1 002

Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum



Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Ahmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal.....

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Sekretaris : Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Saprudin, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tia Pawanda
NIM : 2320215320108
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 28 Juni 2025
Yang membuat pernyataan,

Tia Pawanda
NIM. 2320215320108

PAWANDA, TIA. 2025. KEBIJAKAN PIDANA DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Saprudin, S.H., LL.M., 112 halaman.

RINGKASAN

Perselisihan hubungan industrial merupakan fenomena yang tak terelakkan dalam dinamika hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha. Ketimpangan kedudukan antara kedua belah pihak menjadi salah satu faktor dominan terjadinya perselisihan, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran hak-hak normatif pekerja. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 telah mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase, hingga litigasi di Pengadilan Hubungan Industrial. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran yang bersifat serius, seperti pemberian upah di bawah standar minimum, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, atau pengabaian terhadap perjanjian kerja bersama yang telah disepakati. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas sistem hukum nasional, khususnya dalam penggunaan instrumen hukum pidana untuk menegakkan kepatuhan terhadap norma hubungan industrial. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menelaah bagaimana konstruksi kebijakan pidana dapat digunakan sebagai salah satu instrumen dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial secara adil dan berkeadilan di Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum pidana terhadap pelanggaran norma hubungan industrial, serta merumuskan konstruksi kebijakan pidana yang ideal guna menegakkan kepatuhan pengusaha terhadap norma hukum ketenagakerjaan. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi berbagai kendala dalam penempatan hukum pidana dalam struktur hukum hubungan industrial dan menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung perlindungan pekerja melalui pendekatan penal. Dari sisi kegunaan, secara teoritis penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum pidana dan hukum ketenagakerjaan, khususnya dalam memperkuat teori kebijakan hukum pidana (*penal policy theory*) yang berpihak pada keadilan sosial dan perlindungan kelompok rentan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pembentuk kebijakan dalam merumuskan norma pidana yang proporsional, aplikatif, dan adil untuk diterapkan terhadap pelanggaran-pelanggaran serius dalam hubungan industrial.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*) untuk menelusuri perkembangan norma pidana dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia. Bahan

hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan pengolahan secara sistematis, kemudian dianalisis menggunakan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Seluruh analisis diarahkan untuk membangun pemahaman normatif terhadap urgensi, bentuk, dan keberterimaan instrumen pidana dalam hubungan industrial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pidana dalam sistem hubungan industrial di Indonesia masih sangat terbatas, fragmentaris, dan belum mencerminkan kepentingan perlindungan pekerja secara menyeluruh. Meskipun terdapat beberapa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja, namun sanksi pidana belum secara sistematis digunakan untuk menanggulangi pelanggaran hubungan industrial yang berdampak serius bagi pekerja. Konstruksi kebijakan pidana yang ideal dalam konteks ini menuntut perumusan norma yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan korektif, dengan tetap mengacu pada prinsip proporsionalitas, ultimum remedium, dan keadilan distributif. Penempatan hukum pidana dalam hubungan industrial harus memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan kepastian hukum bagi pengusaha, tanpa mengabaikan fungsi sosial dari sanksi pidana itu sendiri. Oleh karena itu, pemikiran mengenai reformulasi kebijakan pidana dalam hukum ketenagakerjaan menjadi sangat relevan untuk diwujudkan sebagai upaya penegakan keadilan substantif dalam hubungan industrial di Indonesia.

PAWANDA, TIA. 2025. KEBIJAKAN PIDANA DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Saprudin, S.H., LL.M., 112 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci: Kebijakan Pidana, Penyelesaian Perselisihan, Hubungan Industrial

Penelitian ini berjudul Kebijakan Pidana dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Indonesia, yang bertujuan untuk menganalisis sejauh mana hukum pidana berfungsi dalam menanggulangi pelanggaran-pelanggaran dalam hubungan industrial serta merumuskan bentuk kebijakan pidana yang ideal demi menciptakan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara sistematis dan argumentatif. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan diskursus tentang *penal policy* dalam konteks hukum ketenagakerjaan. Secara praktis, hasilnya dapat menjadi masukan kebijakan bagi para pembuat undang-undang dan pemangku kepentingan ketenagakerjaan.

Pengaturan hukum pidana dalam sistem hubungan industrial di Indonesia hingga saat ini masih bersifat parsial dan belum menunjukkan integrasi yang kuat antara norma pidana dan norma ketenagakerjaan. Beberapa ketentuan pidana yang tersebar dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan perubahannya, belum diterapkan secara optimal. Penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran seperti pemutusan hubungan kerja sepihak, pelanggaran perjanjian kerja bersama, dan pengupahan di bawah standar minimum masih rendah, baik dari sisi aparat penegak hukum maupun sistem pelaporan dan pengawasan. Hal ini menyebabkan lemahnya efek jera serta tidak adanya kepastian hukum bagi pihak pekerja.

Dalam rangka menciptakan sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang adil dan efektif, kebijakan pidana harus dikonstruksikan secara lebih sistematis, tegas, dan seimbang. Norma pidana ideal dalam konteks hubungan industrial harus dirancang sebagai instrumen yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif dan korektif. Perlu adanya penguatan substansi sanksi pidana yang mampu menjamin kepatuhan pengusaha terhadap norma hubungan industrial, namun tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan substantif dan perlindungan hukum terhadap pekerja sebagai pihak yang rentan dalam relasi kerja.

PAWANDA, TIA. 2025. CRIMINAL POLICY IN THE SETTLEMENT OF INDUSTRIAL RELATIONS DISPUTES IN INDONESIA. Master of Laws Program, Law, Lambung Mangkurat University. Supervisor: Dr. Saprudin, S.H., LL.M., 112 pages.

ABSTRACT

Keywords: Criminal Policy, Dispute Resolution, Industrial Relations

This study is entitled Criminal Policy in the Settlement of Industrial Relations Disputes in Indonesia. The purpose of this research is to analyze the extent to which criminal law functions in addressing violations in industrial relations and to formulate an ideal criminal policy framework to achieve justice for the disputing parties. The research adopts a normative juridical method, employing statutory, conceptual, and historical approaches. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary sources, analyzed systematically and argumentatively. Theoretically, this study contributes to the development of discourse on penal policy within the context of labor law. Practically, the findings may serve as policy recommendations for lawmakers and stakeholders in the field of industrial relations.

The regulation of criminal law within Indonesia's industrial relations system remains fragmented and lacks strong integration between penal norms and labor regulations. Several criminal provisions embedded in labor legislation, such as Law Number 13 of 2003 and its amendments, have not been effectively implemented. The enforcement of criminal sanctions against violations—such as unilateral termination of employment, breach of collective labor agreements, and payment of wages below the minimum standard—remains weak, both in terms of law enforcement practices and the reporting and monitoring systems. This condition results in a lack of deterrent effect and legal certainty, especially for workers.

To create a fair and effective system for resolving industrial disputes, criminal policy must be constructed more systematically, firmly, and equitably. Ideal criminal norms in the context of industrial relations should be designed not only as repressive tools but also as preventive and corrective mechanisms. It is essential to strengthen the substance of criminal sanctions that ensure employers' compliance with industrial relations norms, while upholding the principle of substantive justice and the legal protection of workers as the vulnerable party in employment relationships.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “Kebijakan Pidana dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Indonesia”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam, sang teladan utama dalam menegakkan keadilan dan kebenaran, serta kepada keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Penulisan tesis ini merupakan hasil dari proses panjang yang penuh dinamika, mencakup pengumpulan referensi, analisis yuridis, refleksi teoritik, serta pendalaman nilai-nilai keadilan dalam sistem hukum pidana dan ketenagakerjaan di Indonesia. Penulis meyakini bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara adil bukan hanya menjadi tanggung jawab institusi negara, tetapi juga merupakan bagian dari tujuan hukum dalam melindungi hak dan martabat manusia sebagai pekerja.

Keberhasilan dalam penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang Terhormat dan Sangat Terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas dukungan, arahan, dan fasilitas akademik yang diberikan dalam menunjang proses penyelesaian studi ini.
2. Yang Terhormat dan Terpelajar Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan pengarahan, dukungan, serta kelancaran dalam proses akademik dan administrasi penulis selama menempuh studi.

3. Yang Terhormat dan Terpelajar Bapak Dr. Saprudin, S.H. LL.M., selaku Pembimbing Utama, yang dengan sabar, teliti, dan penuh dedikasi telah membimbing penulis dalam menyusun dan menyempurnakan isi tesis ini.
4. Bapak dan Ibu seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah membekali penulis dengan ilmu, wawasan, serta semangat berpikir kritis dalam memahami dan mengembangkan kajian hukum.
5. Staf Tendik Program Magister, atas bantuan administrasi yang profesional dan penuh keramahan.
6. Rekan-rekan mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas semangat kebersamaan, diskusi yang konstruktif, dan dukungan moral yang begitu berarti selama menjalani proses perkuliahan dan penulisan tesis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan lapang dada membuka diri terhadap masukan dan kritik konstruktif dari para pembaca, demi perbaikan dan pengembangan keilmuan lebih lanjut.

Akhir kata, penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat, baik dalam ranah akademik maupun dalam praktik hukum, khususnya terkait dengan perlindungan pekerja dan penegakan norma hukum pidana dalam hubungan industrial. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kecil ini sebagai bagian dari upaya menegakkan nilai-nilai keadilan yang diridhai-Nya.

Banjarmasin, Juni 2025

Penulis,

Tia Pawanda

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	v
HALAMAN PERNYATAAN..	vi
RINGKASAN	vii
ABSTRAK	ix
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian	30
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	42
BAB II PENGATURAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA	43
A. Dasar Yuridis Pengaturan Hukum Pidana dalam Hubungan Industrial.....	43
B. Jenis-Jenis Pelanggaran Hubungan Industrial yang Dikenai Sanksi Pidana.....	56
C. Konstruksi Hukum Pidana sebagai Instrumen Kepatuhan terhadap Norma Hubungan Industrial.....	71

BAB III KONSEP KEBIJAKAN PIDANA YANG IDEAL DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL SECARA ADIL DI INDONESIA.....	82
A. Konstruksi Kebijakan Pidana dalam Menyikapi Perselisihan Hubungan Industrial.....	82
B. Prinsip Keadilan dalam Konstruksi Norma Pidana Hubungan Industrial.....	92
C. Penempatan Hukum Pidana dalam Struktur Norma Hubungan Industrial.....	102
BAB IV PENUTUP.....	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran	111

DAFTAR PUSTAKA

